

***Highlight* Evaluasi Kinerja Dua Tahun Prabowo-Gibran di Bidang Energi**

Center of Food, Energy and Sustainable Development

Oktober 2026



Outline Pembahasan

01

Pasokan migas dan ketergantungan impor

Lifting minyak, impor LPG dan BBM

02

Beban fiskal energi

Subsidi dan kompensasi, tarif listrik yang ditahan

03

Siapa yang menikmati subsidi

Penerima subsidi dan kompensasi

04

Batubara, listrik, dan transisi energi

Batubara, listrik, EBT, PLTS 100 GW, anggaran EBTKE

05

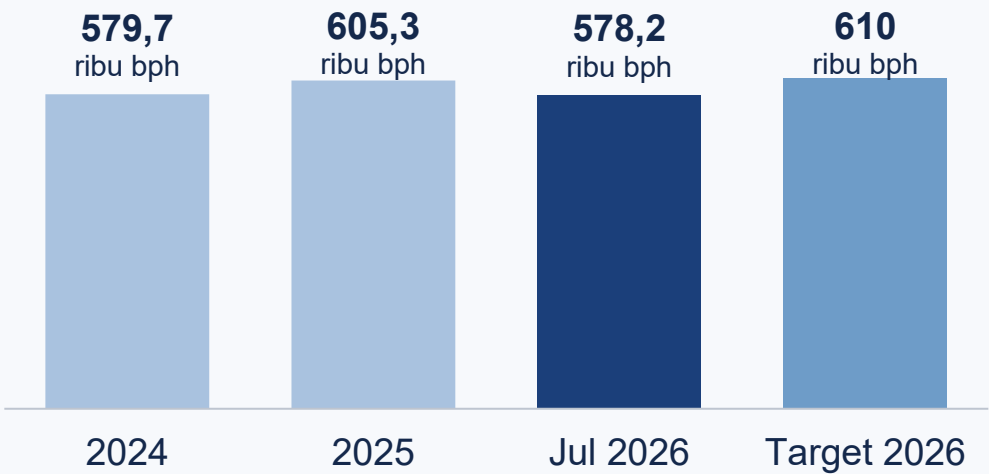
Rekomendasi

Subsidi tepat sasaran, tata kelola listrik, transisi energi

Target berhenti impor minyak sulit tercapai: lifting masih 32 ribu bph di bawah target APBN dan 59% pasokan bergantung impor

Lifting sempat capai target di 2025, lalu turun di 2026

Ribu barel per hari (bph)



59% pasokan minyak berasal dari impor sejak 2024

Porsi total pasokan minyak (crude dan BBM), diolah INDEF dari HEESI



Program sumur rakyat dan sumur tua: 1.500 bph, atau 0,26% dari lifting nasional.

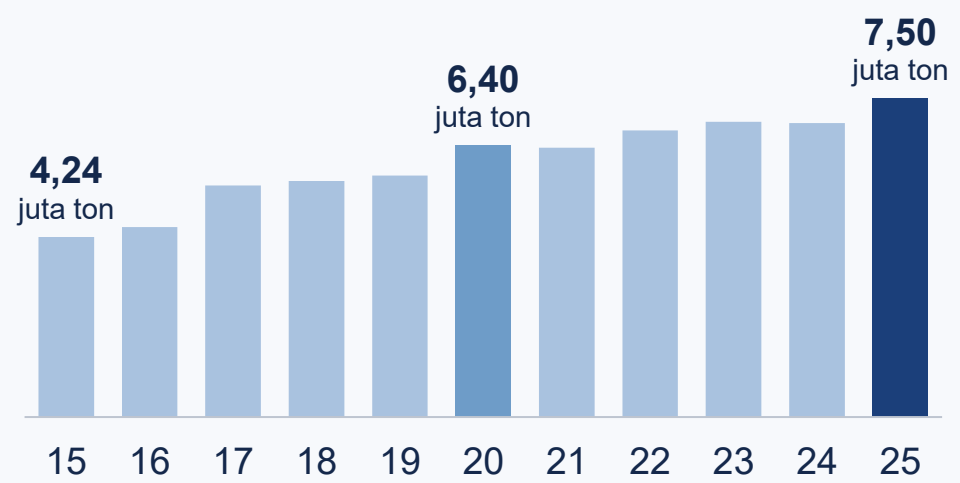
Untuk mencapai target 610 ribu bph, lifting harus rata-rata 654 ribu bph di sisa tahun, lebih tinggi dari produksi bulanan mana pun dalam tiga tahun terakhir.

Sumber: Kementerian ESDM (2026), EMedia DPR RI, HEESI 2025 (2026), diolah INDEF

Ketergantungan impor energi rumah tangga dan transportasi masih tinggi: empat dari lima ton LPG dan sekitar 60% bensin berasal dari impor

Impor LPG naik 77% dalam satu dekade

Juta ton, 2015-2025 · impor 66% → 81% dari penjualan



Impor BBM 2025: 31,0 juta KL

Juta KL menurut jenis: bensin = 76% impor BBM



63% impor bensin dari Singapura, 33% dari Malaysia.

Produksi LPG turun 18% sejak 2015 saat penjualan naik 45%. Jargas 2025—026 baru 119 ribu sambungan dalam tahap konstruksi, atau 8,2% target 1,45 juta sambungan 2029.

Sumber: HEESI 2025 (Kementerian ESDM, 2026), Bakom RI (2026), diolah INDEF

Asumsi harga minyak dalam APBN perlu lebih realistis, karena subsidi dan kompensasi sudah Rp376,8 T dalam sembilan bulan

Tertinggi dalam lima tahun, naik 54%

Realisasi s.d. 30 Sep, Rp T



ICP di atas asumsi tujuh bulan beruntun

ICP 2026, US\$/barel, dibandingkan asumsi APBN US\$70



ICP rata-rata US\$91,9 vs asumsi US\$70 menambah defisit indikatif sekitar Rp149 T. Asumsi 2027 baru US\$75, masih di bawah realisasi berjalan.

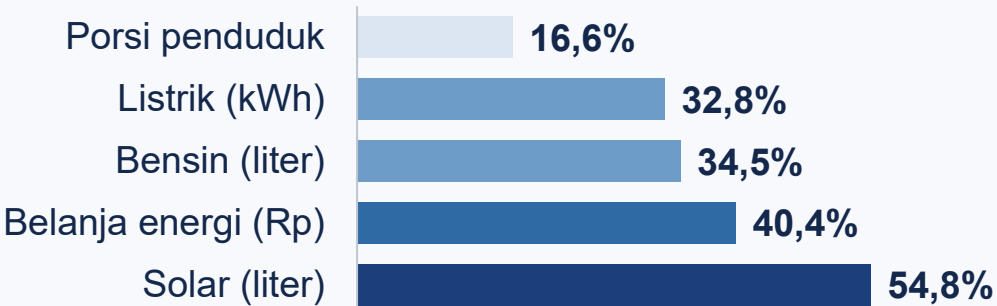
ICP: harga patokan minyak mentah Indonesia · **Kompensasi:** dana APBN pengganti selisih harga jual BBM dan listrik nonsubsidi di bawah harga keekonomian

Sumber: Kemenkeu (2025, 2026), Kementerian ESDM (2026), diolah INDEF · subsidi termasuk nonenergi (pupuk)

Reformasi subsidi energi sangat dibutuhkan, karena subsidi dan kompensasi terus membengkak dan belum tepat sasaran

Porsi energi jauh di atas porsi penduduk

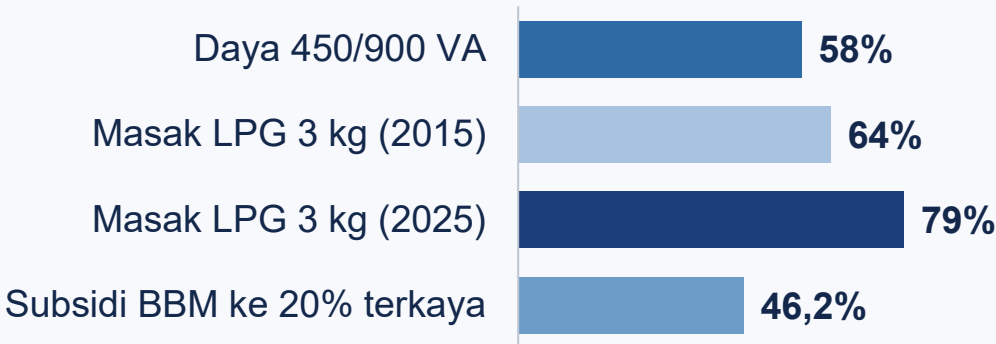
Porsi kelas menengah dalam pemakaian rumah tangga nasional, 2025 (%)



Bersama calon kelas menengah (66% penduduk): 79% listrik, 81% bensin.

Subsidi mengikuti barang, bukan orang

Persen



Hanya 1 dari 8 sambungan 450 VA dimiliki rumah tangga miskin. Karena subsidi melekat pada barang, sebagian manfaatnya ikut mengalir ke kelompok yang lebih mampu.

Kelas menengah: pengeluaran 3,5-17 kali garis kemiskinan

Calon kelas menengah: 1,5-3,5 kali

450/900 VA: golongan daya listrik bersubsidi

Sumber: Working Paper CFESD (2026), Susenas Maret 2025, World Bank (2024)

Kinerja batubara perlu diukur dari manfaatnya bagi negara: produksi tinggi, tetapi PNBP turun 28% dan umur cadangan susut 20 tahun

Volume naik, penerimaan negara turun

Perubahan 2022 ke 2025 (%)

Produksi Batubara: 687,4 ke 817,5 juta ton



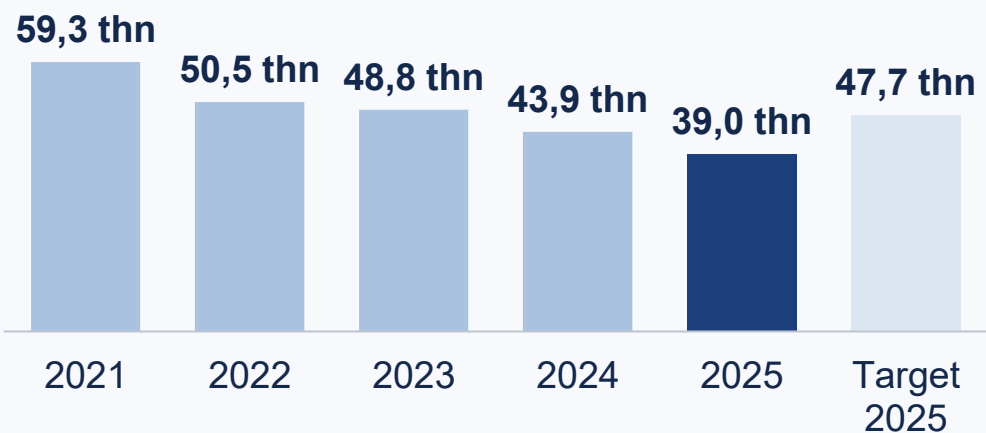
PNBP SDA Minerba · Rp180,5 T ke Rp130,2 T



Capaian PNBP 2025 tetap tercatat 104% dari target Rp124,7 T, meski penerimaannya turun.

Umur cadangan menyusut cepat

Reserve to production (tahun)



Produksi 817 juta ton, 10,5% di atas target 739,7 juta ton, tetap dicatat sebagai capaian. Pasokan berlebih menekan harga ekspor, dan koreksi RKAB datang terlambat.

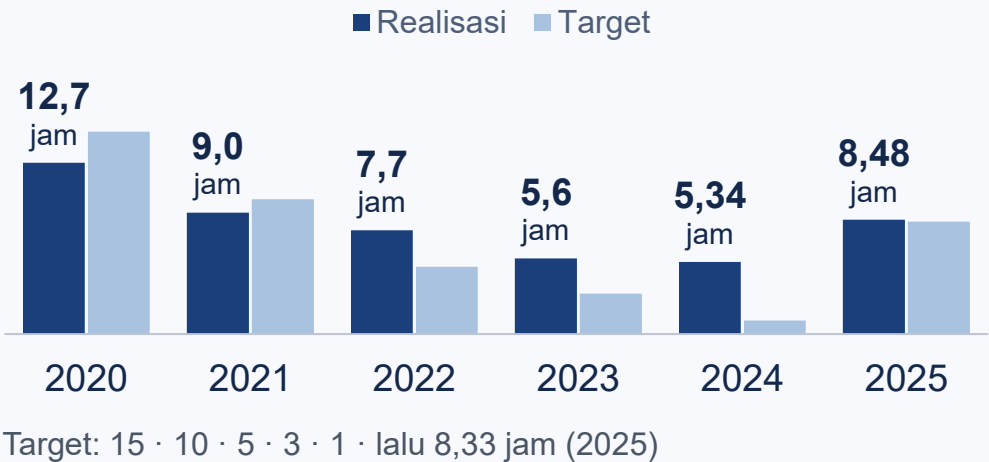
· **RKAB:** rencana kerja dan kuota produksi tambang
· **Reserve to production:** cadangan dibagi produksi tahunan

Sumber: Ditjen Minerba (2026), Kementerian ESDM (2026), Katadata Databoks (2026), diolah INDEF

Keandalan listrik harus jadi prioritas: cadangan daya berlimpah, tetapi padam 59% lebih lama dan targetnya justru dilonggarkan

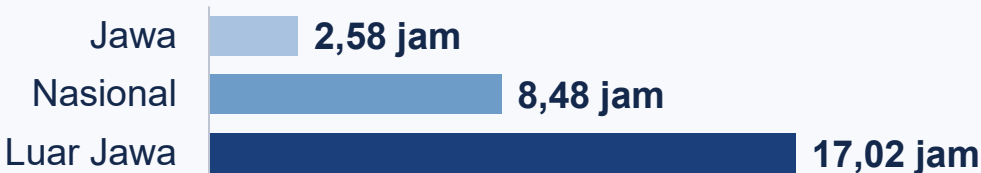
SAIDI berbalik naik, target dinaikkan 8 kali

Jam padam per pelanggan



Luar Jawa padam hampir 7 kali lebih lama

SAIDI 2025, jam per pelanggan



43-50%
reserve margin 2025

27-30%
target reserve margin

Masalahnya jaringan, bukan pembangkit. Bali padam 11,5 jam (Mei 2025) dan gangguan transmisi Sumatera menimpa 13,1 juta pelanggan (Mei 2026).

SAIDI: rata-rata lama padam per pelanggan per tahun

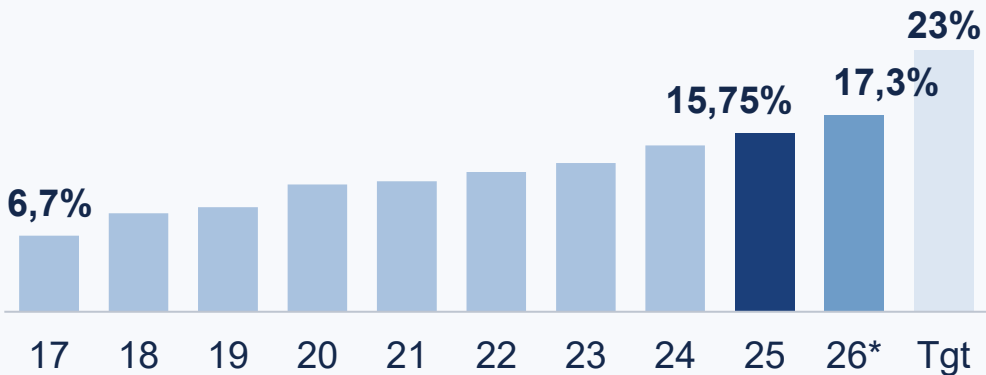
Reserve margin: kelebihan kapasitas pembangkit di atas beban puncak

Sumber: Ditjen Ketenagalistrikan (2026), Statistik PLN 2025, Kementerian ESDM (2025, 2026), diolah INDEF

Target EBT perlu dijaga, bukan diturunkan: bauran 15,75% masih jauh dari 23%, dan capaian 92,6% muncul karena target direvisi

Naik rata-rata 1,1 poin per tahun

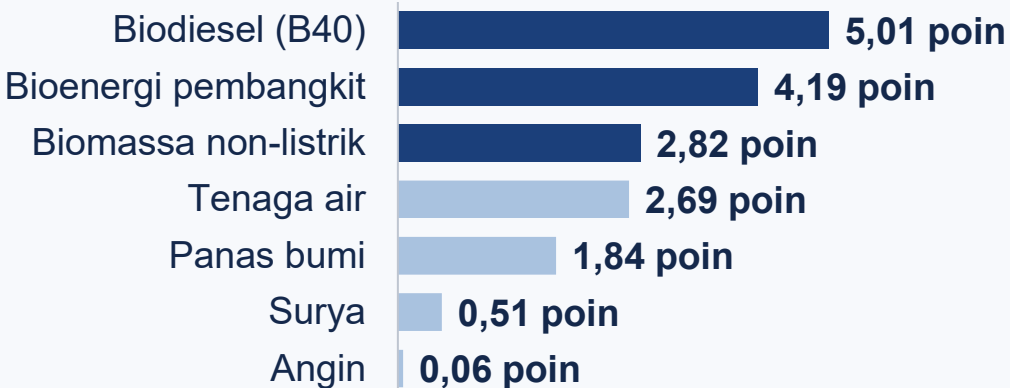
Porsi EBT dalam energi primer (%) · 26* = S1 2026 sementara



Tgt = target RUEN 2025. PP 40/2025 menurunkannya menjadi 17-20%.

70% bauran EBT berasal dari bioenergi

Kontribusi ke bauran EBT S1 2026 (poin persen)



Kenaikan EBT bertumpu pada campuran bahan bakar dan co-firing PLTU, bukan pembangkit baru. Kapasitas EBT hanya bertambah sekitar 2 GW dalam dua tahun.

EBT: energi baru terbarukan · **RUEN:** Rencana Umum Energi Nasional · **Co-firing:** campuran biomassa pada batubara di PLTU · **S1:** semester I

Sumber: Ditjen EBTKE (2026), Kementerian ESDM (2022–2026), HEESI 2025, paparan Dirjen EBTKE (2026), diolah INDEF

Target PLTS 100 GWp perlu masuk RUPTL dan didukung pembenahan kontrak PLTU, karena lajunya harus lebih dari 50 kali laju 2025



Dari proyek RUPTL yang sudah dieksekusi (22,57 GW), baru 0,78 GW beroperasi. Tanpa revisi RUPTL dan pembenahan kontrak take-or-pay PLTU, target 100 GWp akan sulit tercapai.

Sumber: RUPTL PLN 2025-2034, Ditjen EBTKE (2026), INDEF (2026b), diolah INDEF

Anggaran transisi energi perlu dipulihkan: subsidi energi fosil Rp185 T, hampir 500 kali anggaran Ditjen EBTKE yang justru dipangkas

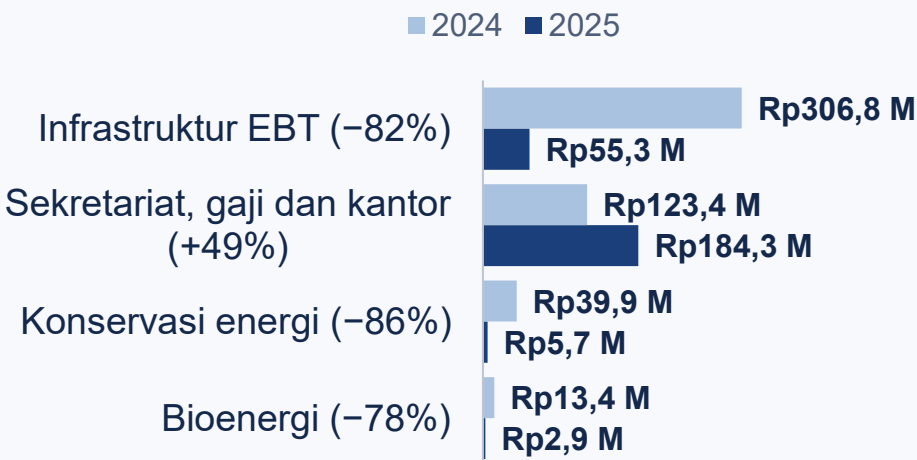
Rp185,17 T untuk fosil, Rp0,37 T untuk EBTKE

Realisasi 2025, Rp triliun



Unit pembangun energi bersih paling dipangkas

Realisasi Ditjen EBTKE, Rp miliar



Porsi EBTKE dalam belanja Kementerian ESDM turun dari 8,5% ke 2,8%, padahal belanja kementerian naik 3,4 kali pagu. Ruang anggarannya ada; yang perlu dibenahi adalah prioritas alokasinya.

Sumber: Kemenkeu (2026b), LKPP 2025 (audited), Ditjen EBTKE (2025, 2026), diolah INDEF

Rekomendasi: subsidi tepat sasaran, listrik yang andal, dan transisi energi yang dibiayai lewat belanja fiskal yang lebih baik

01 Subsidi energi tepat sasaran

Berbasis komoditas



Berbasis orang dan tujuan

- **Listrik dan LPG 3 kg:** subsidi melekat pada rumah tangga lewat blok listrik dasar 80-100 kWh dan data penerima.
- **BBM:** subsidi dapat mengikuti tujuan pemakaian (produktif), seperti transportasi publik, logistik dll. untuk menekan ekonomi biaya tinggi.
- **Skema subsidi BBM eksisting** rawan *inclusion* dan *exclusion error*; kompensasi dibuat transparan.

02 Tata kelola ketenagalistrikan

Menambah pembangkit



Memperkuat jaringan

- **Investasi diarahkan** ke transmisi dan distribusi, karena cadangan daya sudah 43-50%, di atas target 27-30%.
- **Audit terbuka** setiap blackout besar, seperti Bali (Mei 2025) dan Sumatera (Mei 2026), dan target SAIDI dikembalikan ketat.
- **Jaringan luar Jawa** diprioritaskan

03 Transisi energi

Subsidi energi fosil



Investasi energi bersih

- **Subsidi fosil dikurangi bertahap** dan hasil penghematannya dialihkan ke EBT dan jaringan listrik.
- **PLTS 100 GWp masuk RUPTL**, kontrak take-or-pay PLTU dibenahi,
- **Anggaran untuk energi terbarukan ditingkatkan**

Better spending
fiskal

Subsidi fosil dikurangi bertahap

Dana dialihkan
ke jaringan dan EBT

Ekonomi lebih tahan
guncangan global

Inclusion/exclusion error: subsidi diterima yang tidak berhak, atau yang berhak terlewat · **Take-or-pay:** PLN wajib membayar listrik PLTU meski tidak dipakai · **Power wheeling:** penyaluran listrik pembangkit swasta lewat jaringan PLN

Sumber: INDEF CFESD (2026), Evaluasi 2 Tahun Kinerja Prabowo-Gibran

Terima Kasih
